

POLICY BRIEF

Menekan Angka Putus Sekolah di Gorontalo: Pendekatan Terpadu Ekonomi–Keluarga untuk Memperkuat Akses Pendidikan

Muchtar Ahmad¹; Rustam Tohopi²; Mahyudin Humalanggi³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

²Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

³Bappeda Provinsi Gorontalo

Corresponden Author: muchtar.ahmad@ung.ac.id

Ringkasan Eksekutif

Angka anak putus sekolah pada jenjang SMP dan SMA di Provinsi Gorontalo masih menjadi persoalan serius yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial–ekonomi keluarga merupakan penyebab paling dominan. Sebanyak 60–74% orang tua siswa di Gorontalo hanya berpendidikan SD, sehingga kemampuan mendampingi dan memotivasi anak dalam pendidikan sangat terbatas. Selain itu, beban biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan alat praktik (khusus SMK) menjadi kendala besar bagi keluarga berpendapatan rendah.

Program bantuan pendidikan seperti PIP memang menjangkau sebagian siswa, namun keberlanjutannya melemah pada jenjang SMA/SMK. Ketika biaya pendidikan meningkat, justru banyak anak kehilangan dukungan finansial. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian anak memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, sementara akses pendidikan di daerah terpencil masih terhambat oleh jarak dan minimnya fasilitas. Sekolah juga belum memiliki sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi siswa berisiko putus sekolah.

Untuk itu, diperlukan kebijakan berbasis keluarga yang mencakup pendampingan orang tua, penguatan bantuan sosial pendidikan yang berkelanjutan antar jenjang, serta pembentukan sistem deteksi dini dan Tim Reaksi Cepat dropout. Intervensi ekonomi melalui pemberdayaan keluarga miskin, bersama penguatan layanan sekolah, menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka putus sekolah dan memperkuat pembangunan SDM di Provinsi Gorontalo.

Permasalahan

Anak putus sekolah pada jenjang SMP dan SMA di Provinsi Gorontalo merupakan persoalan serius yang terus berulang terutama akibat tekanan sosial–ekonomi keluarga. Kemiskinan yang masih tinggi, rendahnya pendidikan orang tua, serta kemampuan keluarga yang terbatas dalam memenuhi biaya tidak langsung pendidikan menyebabkan banyak anak terpaksa menghentikan sekolah untuk bekerja atau membantu ekonomi keluarga. Ketidakterjangkauan fasilitas pendidikan, kurangnya layanan konseling, dan belum adanya sistem deteksi dini siswa berisiko memperburuk kondisi ini. Masalah ini semakin kompleks karena program bantuan pendidikan belum sepenuhnya berkelanjutan antar jenjang, sehingga anak justru kehilangan dukungan finansial ketika memasuki jenjang SMA/SMK yang biaya pendidikannya lebih tinggi.

Masalah ini penting untuk segera ditangani karena memiliki dampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas jangka panjang, dan mobilitas sosial masyarakat Gorontalo. Anak putus sekolah berisiko tinggi terjebak dalam siklus kemiskinan antar generasi serta kehilangan peluang ekonomi di masa depan. Bagi pemerintah daerah, tingginya angka putus sekolah dapat menghambat pencapaian indikator pembangunan seperti IPM, capaian wajib belajar 12 tahun, dan target pengentasan kemiskinan. Tanpa intervensi kebijakan yang komprehensif dan berbasis keluarga, Provinsi Gorontalo akan mengalami kesenjangan pendidikan yang semakin melebar serta terbatasnya kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

Latar Belakang Data & Konteks Kebijakan

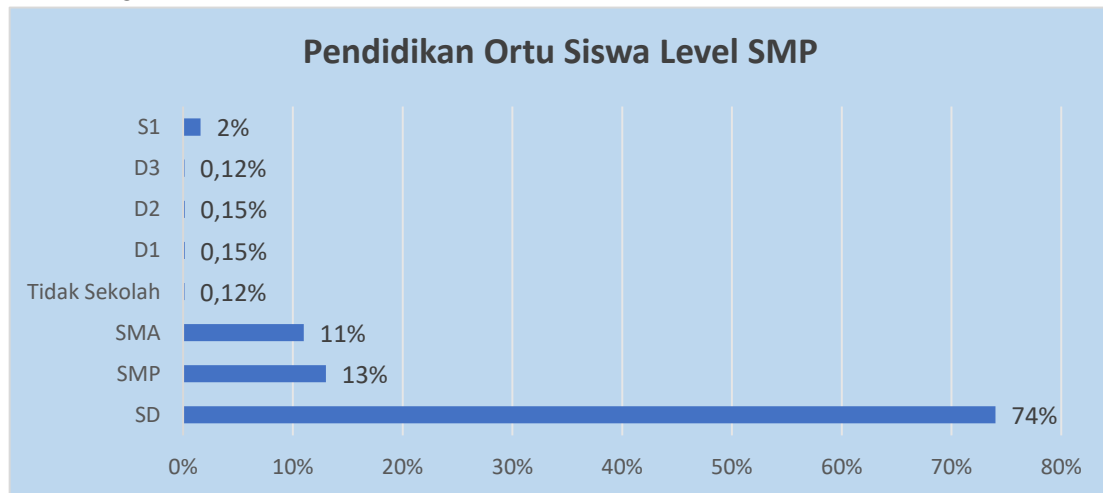
Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Angka kemiskinan yang mencapai 13,87% dan Indeks Pembangunan Manusia yang relatif rendah menunjukkan bahwa ketahanan sosial-ekonomi keluarga belum memadai untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan angka kemiskinan daerah ini mencapai 13,87 persen, masih jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,36 persen. Data di berbagai kabupaten/kota juga menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua siswa hanya berpendidikan SD (60–74%), sehingga kapasitas mereka dalam memberikan dukungan belajar, motivasi pendidikan, serta pengawasan terhadap keberlangsungan sekolah anak sangat terbatas. Ketimpangan ekonomi dan rendahnya literasi pendidikan ini menyebabkan anak rentan putus sekolah, terutama pada masa transisi dari SMP ke SMA/SMK ketika biaya tidak langsung pendidikan meningkat.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,

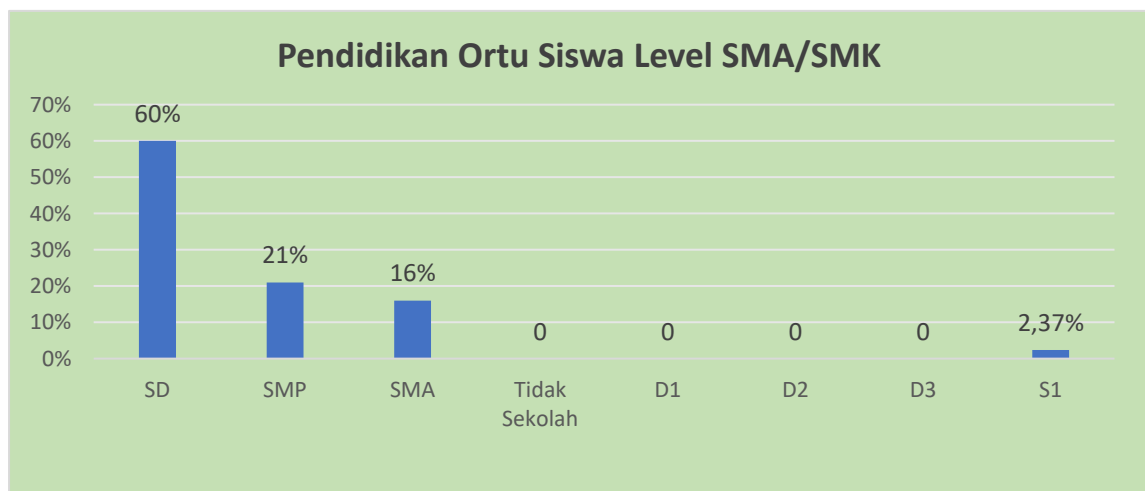
Regulasi ini memperkuat peran pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta program wajib belajar 12 tahun. Di tingkat daerah, beberapa sekolah juga menerapkan kebijakan afirmatif berupa keringanan biaya komite dan dukungan transportasi terbatas bagi siswa di wilayah terpencil. Namun, implementasi kebijakan ini belum terintegrasi secara menyeluruh dan tidak selalu berbasis pada pemetaan risiko siswa secara akurat. Sistem konseling sekolah masih lemah dan tenaga pendampingan tidak merata, sehingga banyak kasus anak berisiko putus sekolah tidak terdeteksi sejak dini. Sementara Kebijakan Provinsi Gorontalo untuk mengatasi anak putus sekolah meliputi program penuntasan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan gratis, bantuan sosial seperti PKH, PIP, dan BLT, serta program spesifik seperti gerakan *“Back to School”* dan sekolah berbasis asrama untuk daerah terpencil.

Kelemahan kebijakan saat ini terlihat dari tidak berkelanjutannya bantuan pendidikan antar jenjang, terutama ketika siswa memasuki SMA/SMK yang membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan tingkat sebelumnya. Penyaluran bantuan sosial pendidikan juga masih bersifat administratif dan tidak berbasis kondisi faktual keluarga, sementara koordinasi antara sekolah, pemerintah desa, dan dinas pendidikan belum optimal sehingga tidak tersedia mekanisme respons cepat untuk siswa yang mulai absen atau menghadapi masalah ekonomi.

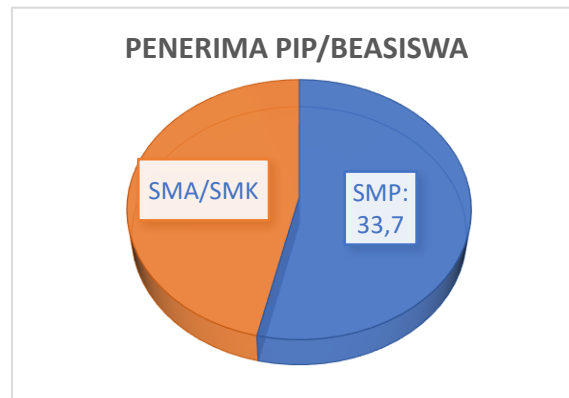
Selain itu, kebijakan penanggulangan putus sekolah belum secara penuh menangani akar permasalahan seperti kemiskinan struktural, budaya bekerja dini, dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih terarah, berbasis keluarga, dan didukung oleh sistem deteksi dini yang kuat untuk menekan angka anak putus sekolah di Provinsi Gorontalo.



Secara keseluruhan, data ini mengilustrasikan bahwa mayoritas siswa SMP berasal dari keluarga orang tua dengan tingkat pendidikan rendah, terutama tingkat SD. Hal ini berdampak pada modal kultural keluarga, kapasitas dukungan akademik, dan aspirasi pendidikan anak. Untuk itu, diperlukan strategi intervensi berbasis sekolah dan masyarakat yang dapat meningkatkan kapasitas keluarga dalam mendukung proses pembelajaran serta mengurangi dampak kesenjangan sosial terhadap capaian pendidikan siswa.



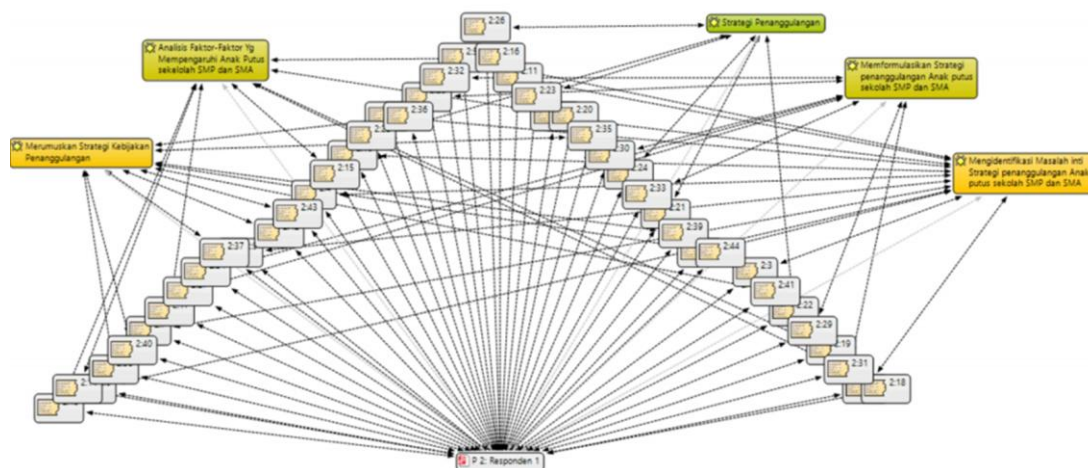
Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMA/SMK berasal dari keluarga dengan pendidikan orang tua rendah, sehingga dukungan akademik, informasi pendidikan tinggi, dan aspirasi karier dari orang tua sangat terbatas, yang dapat memengaruhi kualitas keputusan pendidikan dan masa depan siswa.



Data ini menunjukkan bahwa bantuan PIP paling banyak diterima oleh siswa SMP karena kelompok ini paling rentan secara ekonomi, namun siswa SMA/SMK juga masih menunjukkan kebutuhan bantuan yang besar, menandakan kesenjangan ekonomi keluarga pada kedua jenjang pendidikan tersebut.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Anak Putus Sekolah karena Faktor Sosial Ekonomi Keluarga dan Strategi Penanggulangannya di Provinsi Gorontalo

Anak putus sekolah di Gorontalo dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi (kemiskinan, kebutuhan pendapatan keluarga, biaya tidak langsung sekolah), faktor keluarga (rendahnya pendidikan orang tua, struktur keluarga besar/single parent), faktor sekolah (jarak, biaya praktik/kejuruan, kualitas pengajaran), serta kelemahan tata kelola kebijakan (pendataan tidak tuntas, cakupan bantuan yang terputus antar jenjang). Intervensi efektif harus multisector, menggabungkan bantuan finansial, penguatan layanan sekolah, peningkatan kapasitas keluarga, dan sistem data/monitoring yang solid.



Sumber: Data Olahan Kualitatif Atlas.ti, 2025

Memformulasi Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Provinsi Gorontalo melalui Program Penanganan Melalui Penanganan Faktor Sosial dan Ekonomi Keluarga.

Akar putus sekolah di Gorontalo didominasi oleh faktor ekonomi rumah tangga (kemiskinan, kebutuhan likuid), dilipatgandakan oleh rendahnya pendidikan orang tua, biaya tidak langsung sekolah (alat praktik SMK, transport), dan kendala administrasi penerima bantuan.

Intervensi bersifat multidimensi harus menargetkan keluarga (bukan hanya siswa) kombinasi bantuan finansial, penguatan kapasitas orang tua, kemudahan akses administrasi bantuan, serta layanan sekolah sebagai safety-net adalah kunci.

Analisisnya mengapa faktor sosio-ekonomi keluarga menyebabkan anak putus sekolah antara lain:

- 1) Kebutuhan ekonomi jangka pendek; keluarga memprioritaskan penghasilan saat ini, anak bekerja dan memilih putus sekolah.
- 2) Biaya tidak langsung sekolah meningkat pada jenjang menengah (SMK: alat praktik; SMA: transport, biaya tambahan) beban tambahan memaksa keluarganya menghentikan pendidikan anak.
- 3) Rendahnya pendidikan orang tua keterbatasan kemampuan
- 4)
- 5) mendampingi belajar, mengakses informasi beasiswa, dan menanamkan aspirasi pendidikan → keputusan penghentian pendidikan.
- 6) Kelemahan tata kelola bantuan bantuan PIP/beasiswa tidak berkelanjutan dari SMP, SMA/SMK atau administrasi mempersulit pencairan penerima potensial terlewatkan.
- 7) Faktor sosial-budaya dan gender norma yang mendorong anak perempuan berhenti sekolah lebih cepat (pernikahan dini, pekerjaan rumah), menguatkan risiko putus sekolah.

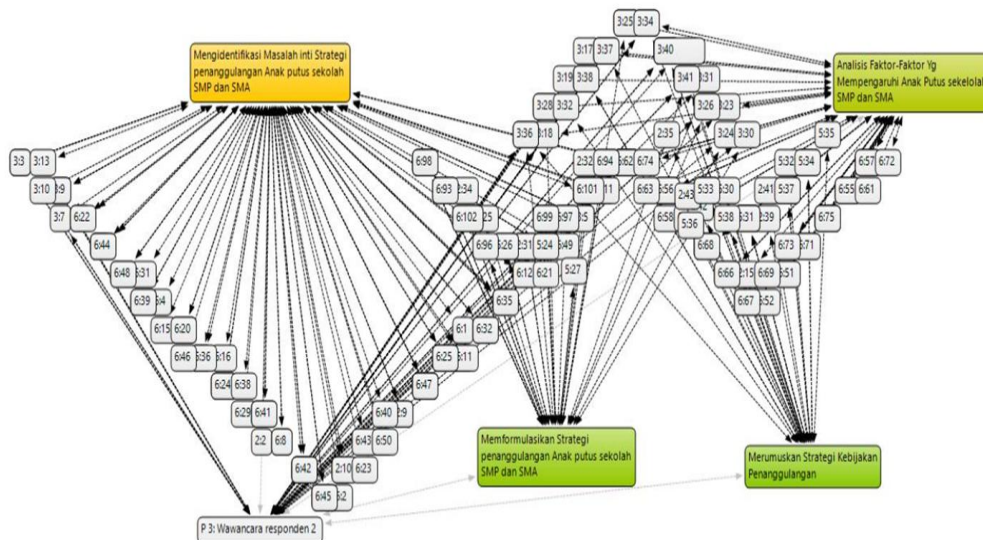
Merumuskan Strategi Kebijakan Penanggulangan Anak Putus Sekolah Faktor Sosial - Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo.

Anak putus sekolah di Gorontalo terutama dipengaruhi oleh kendala sosial-ekonomi keluarga; pendapatan rumah tangga yang rendah, biaya tidak langsung pendidikan (alat praktik SMK, transport, seragam), rendahnya pendidikan orang tua, serta celah tata kelola bantuan pendidikan (mis. transisi PIP). Untuk menurunkan angka putus sekolah diperlukan strategi kebijakan terintegrasi yang menargetkan keluarga (bukan hanya siswa), memperbaiki mekanisme bantuan, memperkuat peran sekolah sebagai safety net, dan membangun sistem deteksi dini berbasis data.

Bukti empirisnya, Latar pendidikan orang tua; data grafik sebelumnya menunjukkan dominasi orang tua lulusan SD (~60–65%), SMP ~18–21%, SMA/SMK - 14–16%, S1 sangat kecil (~2%). Kondisi ini memperbesar risiko rendahnya dukungan akademik dan rendahnya aspirasi pendidikan di rumah.

Cakupan penerima PIP tercatat lebih tinggi di tingkat SMP (33,7%) dibanding SMA/SMK (29,19%). Menurun pada jenjang atas ini menunjukkan potensi kebocoran bantuan atau putusnya keberlanjutan dukungan tepat ketika kebutuhan biaya meningkat.

Temuan Kunci



Sumber: Data Olahan Kualitatif Atlas.ti, 2025

1. Kemiskinan keluarga menjadi penyebab dominan anak putus sekolah. Banyak keluarga responden memiliki pendapatan rendah dan tidak mampu memenuhi biaya tidak langsung pendidikan seperti transportasi, seragam, dan alat belajar. Kondisi ini mendorong anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga sehingga menghentikan sekolah.
2. Pendidikan orang tua sangat rendah (60–74% lulusan SD). Tingkat pendidikan orang tua yang rendah menyebabkan kemampuan pendampingan belajar dan pemahaman pentingnya pendidikan menjadi minim. Ini berdampak pada rendahnya motivasi anak untuk melanjutkan sekolah.
3. Dukungan bantuan pendidikan belum berkelanjutan antar jenjang. Cakupan PIP relatif baik di tingkat SMP, namun menurun pada tingkat SMA/SMK, padahal pengeluaran pendidikan meningkat pada jenjang tersebut. Hal ini membuat banyak siswa kehilangan dukungan tepat ketika kebutuhan biaya bertambah.
4. Anak bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Temuan lapangan menunjukkan sejumlah anak terlibat kerja informal untuk membantu orang tua, seperti buruh harian atau pekerjaan domestik. Hal ini memperkuat hubungan antara tekanan ekonomi dan risiko putus sekolah.
5. Akses terhadap layanan pendidikan masih terbatas di daerah tertentu. Jarak sekolah yang jauh, biaya transportasi, dan fasilitas belajar yang minim menjadi hambatan khususnya di kecamatan dengan geografis sulit. Akibatnya, tingkat absensi meningkat dan risiko drop-out lebih tinggi.
6. Sekolah belum memiliki sistem deteksi dini siswa berisiko putus sekolah. Tidak tersedia mekanisme formal untuk memantau siswa yang sering absen, menurun prestasinya, atau mengalami masalah keluarga. Guru BK terbatas, dan tidak ada tim respons cepat yang dapat mencegah anak berhenti sekolah lebih awal.

Analisis Kebijakan

Akar permasalahan anak putus sekolah di Provinsi Gorontalo terutama bersumber dari kemiskinan struktural dan rendahnya ketahanan sosial–ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi yang lemah membuat keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus tidak mampu menanggung biaya tidak langsung pendidikan seperti transportasi, seragam, alat praktik SMK, dan kebutuhan harian sekolah. Rendahnya pendidikan orang tua, sebagian besar hanya lulusan SD, membatasi kemampuan keluarga dalam memberikan dukungan belajar, pemahaman nilai pendidikan, dan pengambilan keputusan pendidikan yang tepat bagi anak. Situasi ini menyebabkan pendidikan tidak diprioritaskan secara optimal dalam keluarga, sehingga anak lebih rentan untuk berhenti sekolah ketika menghadapi tekanan ekonomi atau masalah sosial.

Beberapa faktor penyebab memperkuat akar masalah tersebut. Pertama, bantuan pendidikan belum berkelanjutan antar jenjang, terutama pada masa transisi SMP–SMA/SMK ketika biaya meningkat. Kedua, akses fisik ke sekolah masih sulit di wilayah tertentu, sehingga meningkatkan beban biaya dan risiko absensi. Ketiga, minimnya sistem deteksi dini di sekolah membuat kasus siswa berisiko putus sekolah tidak teridentifikasi secara cepat, karena guru BK dan mekanisme pemantauan tidak memadai. Keempat, dalam beberapa kasus, terdapat nilai budaya bekerja dini dan keterlibatan anak dalam membantu ekonomi keluarga, sehingga memperkuat keputusan untuk menghentikan sekolah. Ketiadaan koordinasi antara sekolah, pemerintah desa, dan dinas pendidikan memperburuk efektivitas kebijakan yang ada.

Jika masalah ini tidak ditangani secara komprehensif, terdapat risiko jangka panjang berupa melemahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya jumlah anak yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah, serta memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Tingginya angka putus sekolah akan menghambat pencapaian target pembangunan daerah, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), cakupan wajib belajar 12 tahun, penurunan kemiskinan, dan keberhasilan program penguatan SDM daerah. Dalam perspektif jangka panjang, kondisi ini dapat menjadi beban sosial dan ekonomi bagi pemerintah daerah.

Interpretasi temuan berdasarkan beberapa teori yang relevan bahwa kondisi ini sejalan dengan konsep *Human Capital Theory*, Gary Becker (1975) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi modal manusia, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar kapasitas produktivitasnya di masa depan. Dalam konteks putus sekolah, rendahnya pendidikan orang tua dan terbatasnya akses pendidikan menghambat akumulasi modal manusia dalam keluarga, yang pada gilirannya memperkuat siklus kemiskinan. Rendahnya investasi pendidikan dalam keluarga menghambat peningkatan produktivitas dan pendapatan di masa depan.

Temuan ini relevan dengan teori Model ekonomi makro ini (Galor & Zeira, 1993) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan (*wealth distribution*) memiliki dampak jangka panjang pada investasi pendidikan (*human capital*) karena adanya pasar kredit yang tidak sempurna. Artinya, keluarga miskin mungkin tidak mampu membiayai pendidikan anak karena keterbatasan modal awal dan akses pinjaman, ini sangat relevan dengan temuan bahwa kemiskinan struktural menghambat keberlanjutan sekolah anak.

Teori ini pula didukung oleh Pierre Bourdieu (1990) dalam Teori Reproduksi Budaya (*cultural reproduction*) yang menekankan bahwa sekolah dan pendidikan mereproduksi struktur sosial melalui konsep modal budaya (*cultural capital*), *habitus*, dan *“field”*. Dalam konteks putus sekolah, meskipun ada bantuan keuangan, jika orang tua atau lingkungan keluarga tidak memiliki modal budaya (misalnya nilai pendidikan, norma belajar), maka anak

lebih rentan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Teori ini juga menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Temuan juga konsisten dengan teori *Educational Access Framework*, dikemukakan oleh Lewin (2007) yang menekankan bahwa akses pendidikan dipengaruhi oleh tiga dimensi: keterjangkauan, ketersediaan, dan kualitas dukungan keluarga. Dari perspektif kebijakan sosial, situasi ini mencerminkan ketidakefektifan *social protection system* untuk kelompok rentan. Oleh karena itu, penanganan anak putus sekolah di Gorontalo memerlukan kebijakan terpadu yang tidak hanya menyediakan bantuan pendidikan, tetapi juga memperkuat kapasitas keluarga, memperbaiki mekanisme sekolah, dan memastikan koordinasi antar lembaga berjalan efektif.

Uraian kajian ini dapat pula memperkuat berbagai regulasi, yakni Undang-Undang Pendidikan Nomor Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu Pasal 5 wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah pada point (j) dinyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh/melanjutkan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pasal 1, ditegaskan program penguatan Pendidikan Karakter adalah dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari gerakan nasional revolusi mental.

Opsi Kebijakan

Pilihan Pertama: Penguatan Bantuan Sosial Pendidikan Berbasis Keluarga (*Family-Based Education Assistance*)

Meningkatkan keberlanjutan bantuan pendidikan seperti PIP/BOS dengan mekanisme baru yang memastikan anak tetap mendapatkan dukungan pada masa transisi SMP–SMA/SMK. Bantuan disesuaikan dengan kondisi keluarga (pendapatan, jumlah tanggungan, dan jarak sekolah).

Kelebihan:

- 1) Menyasar akar masalah utama yaitu kemiskinan keluarga.
- 2) Mengurangi beban biaya tidak langsung pendidikan (transportasi, seragam, alat praktik).
- 3) Bukti lapangan menunjukkan bahwa bantuan pendidikan sangat berpengaruh pada keberlanjutan sekolah.
- 4) Cepat memberikan dampak jangka pendek.

Kekurangan:

- 1) Berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas ekonomi keluarga.
- 2) Membutuhkan validasi data keluarga yang lebih ketat di tingkat desa/sekolah.
- 3) Risiko salah sasaran jika koordinasi antar lembaga tidak tepat.

Feasibility:

Pilihan ini masuk dalam kategori **(Tinggi)**. Mekanisme bantuan sosial sudah ada (PIP, BOS, Dinas Sosial), sehingga kebijakan dapat diperkuat tanpa membuat skema baru. Pemerintah daerah dapat melakukan integrasi pendataan dengan sekolah dan desa secara cepat.

Pilihan Kedua: Pembentukan Sistem Deteksi Dini dan Tim Reaksi Cepat Putus Sekolah (Early Warning System + TRC)

Mengembangkan sistem monitoring siswa berisiko putus sekolah melalui absensi, nilai, dan kondisi sosial keluarga, serta membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) di sekolah dan tingkat kecamatan.

Kelebihan:

- 1) Mencegah siswa putus sekolah sebelum terjadi.
- 2) Biaya implementasi relatif rendah karena memanfaatkan sekolah/guru BK.
- 3) Didukung oleh bukti laporan: sekolah belum memiliki mekanisme deteksi dini sehingga banyak kasus terlambat ditangani.
- 4) Dapat dikombinasikan dengan program sosial lainnya.

Kekurangan:

- 1) Membutuhkan kapasitas guru BK dan wali kelas yang memadai.
- 2) Memerlukan sistem administrasi data yang rapi dan pelatihan.
- 3) Butuh koordinasi lintas aktor (sekolah–desa–dinas pendidikan).

Feasibility:

Pilihan ini masuk dalam kategori **(Sedang–Tinggi)**. Struktur sekolah telah tersedia, namun memerlukan pelatihan, SOP, dan instrumen monitoring. Kebijakan mudah diterapkan jika ada dukungan Dinas Pendidikan dan pemerintah desa.

Pilihan Ketiga: Program Penguatan Ekonomi Keluarga Rentan Berbasis Desa (Community & Household Economic Empowerment)

Memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga yang memiliki anak berisiko putus sekolah melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, atau program padat karya desa.

Kelebihan:

- 1) Menangani akar masalah jangka panjang: kemiskinan struktural.
- 2) Mengurangi beban ekonomi sehingga anak tidak perlu bekerja.
- 3) Mendorong kemandirian keluarga dan mengurangi ketergantungan pada bantuan tunai.
- 4) Relevan dengan temuan laporan bahwa banyak anak putus sekolah karena tekanan ekonomi.

Kekurangan:

- 1) Membutuhkan anggaran lebih besar dan koordinasi dengan pemerintah desa, dinas sosial, dan UMKM.
- 2) Dampak tidak langsung (butuh waktu lebih panjang untuk terlihat).
- 3) Risiko program tidak tepat sasaran jika data kemiskinan tidak akurat.

Feasibility:

Pilihan ini masuk dalam kategori **(Sedang)**. Desa memiliki Dana Desa yang dapat diarahkan untuk program pemberdayaan. Namun implementasi membutuhkan regulasi teknis dan koordinasi yang kuat. Dampaknya jangka panjang tetapi strategis.

Ringkasan dalam Tabel :

Pilihan Kebijakan	Kelebihan	Kekurangan	Feasibility
1. Bantuan Pendidikan Berbasis Keluarga	Dampak cepat, menyasar akar ekonomi	Risiko ketergantungan	Tinggi
2. Sistem Deteksi Dini + TRC	Mencegah DO sebelum terjadi	Perlu kapasitas guru BK	Sedang–Tinggi
3. Penguatan Ekonomi Keluarga	Mengatasi akar kemiskinan	Dampak jangka panjang	Sedang

Implikasi Kebijakan (Policy Implications)

Pelaksanaan rekomendasi kebijakan ini berpotensi menghasilkan dampak signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, sistem deteksi dini dan Tim Reaksi Cepat (TRC) akan mampu mengidentifikasi dan menangani siswa berisiko sehingga menurunkan angka putus sekolah secara cepat, sementara keberlanjutan bantuan pendidikan dan subsidi transportasi akan langsung meringankan beban ekonomi keluarga. Pendampingan keluarga rentan dan penguatan akses alat praktik SMK akan meningkatkan motivasi belajar serta memastikan siswa tetap terhubung dengan sekolah. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat memutus siklus kemiskinan melalui peningkatan capaian pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, memperkuat stabilitas sosial, serta meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Integrasi program pemberdayaan keluarga juga menciptakan perubahan struktural yang memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan menurunkan ketergantungan pada bantuan sosial. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini akan mendorong perubahan sosial positif, memperluas kesempatan mobilitas ekonomi, dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Provinsi Gorontalo.

Penutup

Tingginya angka anak putus sekolah di Provinsi Gorontalo merupakan persoalan mendesak yang membutuhkan tindakan cepat dan terkoordinasi, karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia, tingkat kemiskinan, dan masa depan pembangunan daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu segera mengambil langkah konkret untuk mencegah semakin banyak anak keluar dari sistem pendidikan formal.

Langkah awal yang paling realistis dan segera dilakukan adalah membentuk Sistem Deteksi Dini dan Tim Reaksi Cepat di setiap sekolah serta memastikan keberlanjutan bantuan

pendidikan bagi siswa rentan, terutama pada masa transisi SMP menuju SMA/SMK. Upaya ini perlu diikuti dengan penguatan kapasitas keluarga dan penyediaan dukungan logistik seperti subsidi transportasi di wilayah yang sulit dijangkau.

Dengan komitmen yang kuat dan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah dapat menciptakan perubahan signifikan dan memastikan bahwa setiap anak Gorontalo memperoleh kesempatan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pendidikan Indonesia 2023/2024*. BPS.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Pedoman Penyusunan Policy Brief BRIN*. BRIN.
- Becker, G. S. . (1975). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (G. S. . Becker, Ed.; 1st ed.). University of Chicago Press.
- Galor, O., & Zeira, J. (1993). *Income Distribution and Macroeconomics. The Review of Economic Studies*, **60**(1), 35–52. DOI: 10.2307/2297811
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. DOI: 10.2307/589547
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024*. Kemendesa.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar*. Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Profil Pendidikan Indonesia Tahun 2023*. Kemendikbudristek.
- Lewin, K. M. (2007). *Improving Access, Equity and Transitions in Education: Creating a Research Agenda*. CREATE Pathways to Access Research Monograph No. 1. University of Sussex.
- Nasution, R., & Fahmi, M. (2020). Household poverty and child schooling decisions in Indonesia. *International Journal of Educational Development*, **75**, 102179. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102179>
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/132142/perda-prov-gorontalo-no-5-tahun-2019>
- Sari, D., & Hadiyanto. (2021). Factors affecting school dropout in rural Indonesia: An economic perspective. *Journal of Social and Educational Policy*, **14**(2), 112–129.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Addressing school dropout and learning loss in Indonesia: Policy recommendations*. UNICEF.
- World Bank. (2020). *The promise of education in Indonesia: Policy directions for better learning outcomes*. World Bank.